



# Pengkajian Rumah Tangga Pasca Bencana dan Hubungannya dengan Perlindungan Sosial di Indonesia

Laporan  
Ringkasan  
Februari, 2024

# Kata Pengantar

Laporan ringkasan ini dibuat berdasarkan laporan yang ditulis oleh Dewi Novirianti dan Asha Williams, yang telah disunting oleh Sheila Town. Tim mengucapkan terima kasih kepada para peninjau sejawat, Jian Vun dan Yasuhiro Kawasoe atas saran-saran mendalam yang diberikan terkait isi laporan ini. Muhammad Halik Rizki, Ekki Syamsulhakim, dan Jolanta Kryspin-Watson juga telah memberikan masukan dan kontribusi yang berharga. Tim secara khusus mengucapkan terima kasih kepada jajaran staf dan pejabat di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atas segala masukan yang mendalam terkait studi dan laporan akhir ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada segenap staf dari berbagai lembaga yang telah memberikan informasi dan wawasan berharga selama proses pengumpulan data (daftar lengkap disajikan dalam Lampiran 1 laporan ini). Terakhir, tim menyampaikan terima kasih kepada para pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial di Jamaika, dan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga di Chili, atas masukan yang telah diberikan terkait teks-teks untuk proses pengkajian rumah tangga pasca bencana di masing-masing negara, serta apresiasi kepada Marcela Salvador dan Briana Wilson atas fasilitasi yang diberikan.

Pendanaan untuk laporan ini diberikan oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Pemerintah Australia melalui Kemitraan Australia Bank Dunia Indonesia (ABIP). Tim mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Australia atas masukan dan dukungan berharga yang telah diberikan.

# Pengungkapan

Laporan ini merupakan hasil karya staf Bank Dunia. Segala hasil temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang diungkapkan dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan Direktur Eksekutif Bank Dunia atau pemerintah yang diwakili. Bank Dunia tidak menjamin keakuratan data yang disertakan dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi, dan informasi lain yang ditampilkan pada peta apa pun dalam laporan ini tidak mewakili penilaian Bank Dunia mengenai status hukum suatu wilayah ataupun bentuk dukungan atau penerimaan terhadap batas-batas tersebut.

Foto sampul: © Koleksi Foto Bank Dunia

Design Laporan: Yolanda Yvonne Armanto

# Pengkajian Rumah Tangga Pasca Bencana dan Hubungannya dengan Perlindungan Sosial di Indonesia

Laporan Ringkasan  
Februari, 2024



# Daftar Isi

<i>Ringkasan</i> .....	1
<i>Mengapa Ini Penting</i> .....	2
<i>Studi Kasus dan Praktik Terbaik Global</i> .....	5
1 <i>Chili: File Darurat Dasar (Ficha Básica de Emergencia - FIBE)</i> .....	5
2 <i>Pengkajian Dampak dan Kebutuhan Bencana Rumah Tangga Jamaika (JHDINA)</i> .....	6
3 <i>Indonesia: WelTraC - dari pengkajian statis menjadi pemantauan kesejahteraan berkelanjutan</i> .....	7
<i>Hasil Temuan:</i> .....	8
<i>Langkah-langkah Selanjutnya:</i> .....	9
Daftar Pustaka .....	14
Endnotes .....	16

# Daftar Singkatan

ASP	<i>Adaptive Social Protection</i> (Perlindungan Sosial Adaptif)
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BLM	Bantuan Langsung Masyarakat
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BNPT	Bantuan Pangan Non-Tunai
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
CCT	<i>Conditional Cash Transfer</i> (Bantuan Tunai Bersyarat)
Dinsos	Dinas Sosial
Ditjen Linjamsos	Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
DRM	<i>Disaster Risk Management</i> (Manajemen Risiko Bencana)
DRR	<i>Disaster Risk Reduction</i> (Pengurangan Risiko Bencana)
DTKS	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTM	<i>Disaster Tracking Matrix</i> (Matriks Pelacakan Bencana)
ECB	<i>Emergency Capacity Building</i> (Pembangunan Kapasitas Darurat)
ERM	<i>Emergency Response Mechanism</i> (Mekanisme Tanggap Darurat)
FIBE	<i>Ficha Básica de Emergencia</i> (File Darurat Dasar – Republik Chili)
GBV	<i>Gender-Based Violence</i> (Kekerasan Berbasis Gender)
HAC	<i>Humanitarian Assistance Committee</i> (Komite Bantuan Kemanusiaan)
HEAT	<i>Household Emergency Assessment Tool</i> (Alat Pengkajian Bencana Rumah Tangga)
Huntap	Hunian Tetap
Huntara	Hunian Sementara
IFI	<i>International Financial Institution</i> (Lembaga Keuangan Internasional)
IOM	<i>The International Organization for Migration</i> (Organisasi Internasional untuk Migrasi)
Jadup	Jaminan Hidup
JHDINA	<i>Jamaica Household Disaster Impact and Needs Assessment</i> (Pengkajian Dampak Bencana dan Butuhan Rumah Tangga Jamaika)
Jitupasna	Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
JNA	<i>Joint Needs Assessment</i> (Pengkajian Kebutuhan Bersama)
KSB	Kampung Siaga Bencana
MDMC	<i>Muhammadiyah Disaster Management Center</i> (Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah)
MHPS	<i>Mental Health and Psychosocial Support</i> (Dukungan Kesehatan Mental dan Psikososial)
Kemenkeu	Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kemenkes	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
KemenPUPR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Kemensos	Kementerian Sosial Republik Indonesia
Kemendesa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
KemenPPPA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
NDRMC	<i>National Disaster Risk Management Council</i> (Dewan Nasional Penanggulangan Risiko Bencana)

LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
NTB	Nusa Tenggara Barat
OPD	Organisasi Perangkat Daerah
PDHA	<i>Post-Disaster Household Assessment</i> (Pengkajian Rumah Tangga Pasca Bencana)
PDNA	<i>Post-Disaster Needs Assessment</i> (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana)
Perka	Peraturan Kepala (Badan Nasional Penanggulangan Bencana)
PKH	Program Keluarga Harapan
Pusdalops	Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana
R3P	Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Regsosek	Registrasi Sosial Ekonomi
SIAP SIAGA	Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesiapsiagaan Bencana
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SK	Surat Kuasa
SP	<i>Social Protection</i> (Perlindungan Sosial)
Tagana	Taruna Siaga Bencana
UNFPA	<i>United Nations Population Fund</i> (Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-bangsa)
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i> (Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-bangsa)
WASH	<i>Water, Sanitation and Hygiene</i> (Air, Sanitasi dan Kebersihan Diri)







## Ringkasan

*Laporan ini mempelajari bagaimana pengkajian dampak dan kebutuhan rumah tangga yang terkena dampak bencana dilakukan di Indonesia, serta bagaimana informasi tersebut dapat digunakan untuk memberikan bantuan Perlindungan Sosial kepada rumah tangga tersebut. Yang terpenting, laporan ini memberikan langkah-langkah untuk meningkatkan proses pengkajian pasca bencana, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan dan dampak yang dialami oleh rumah tangga yang terkena dampak bencana. Selain itu, laporan ini menjelaskan bagaimana koordinasi yang lebih efektif dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu dalam menanggapi guncangan.*



# Mengapa ini Penting:

Indonesia memiliki tingkat paparan yang tinggi terhadap bahaya alam dan risiko guncangan di tingkat masyarakat akibat bahaya alam, yang semakin diperparah oleh dampak perubahan iklim. Hal ini disebabkan oleh posisi geografis Indonesia yang berada di Cincin Api Pasifik, wilayah sekitar Samudera Pasifik yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Selain itu, indeks risiko bencana alam di Indonesia, seperti tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan, juga relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, dan peristiwa-peristiwa tersebut kemungkinan besar akan semakin diperparah dampak perubahan iklim.

**Bencana sering kali memaksa individu dan rumah tangga yang hampir miskin jatuh ke dalam kemiskinan, dan memperparah kemiskinan bagi rumah tangga yang sudah miskin, sehingga meningkatkan kebutuhan akan perlindungan sosial.** Dari 76 juta orang yang terkena dampak banjir di Indonesia, 40 juta di antaranya hidup dalam kemiskinan dengan pendapatan kurang dari US\$5,50 per hari (14,3 persen dari populasi), dan 16 juta (5,7 persen) berpendapatan kurang dari US\$3,20 per hari. Rumah tangga miskin dan hampir miskin umumnya memiliki persediaan aset yang relatif rendah, sehingga lebih rentan terhadap guncangan. Pada tahun 2019, diperkirakan sekitar satu dari sepuluh masyarakat Indonesia rentan jatuh ke dalam kemiskinan akibat guncangan kovariat. Dampak-dampak tersebut meningkatkan kebutuhan akan perlindungan sosial, karena rumah tangga yang terkena dampak mungkin harus mengeluarkan biaya-biaya tak terduga, seperti biaya pengobatan, perbaikan rumah atau tempat usaha, atau biaya tambahan untuk mengakses makanan dan kebutuhan dasar lainnya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut dapat dengan cepat menguras sumber daya rumah tangga yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

**Program dan layanan Perlindungan Sosial merupakan instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan mitigasi risiko.** *“Perlindungan Sosial membantu individu dan masyarakat untuk mengelola risiko dan ketidakpastian, melindungi dari kemiskinan dan kemelaratan, serta memfasilitasi akses ke peluang ekonomi melalui instrumen yang meningkatkan kesetaraan, ketahanan, dan kesempatan.”* Hal tersebut umumnya dilaksanakan melalui program bantuan sosial non-iuran, asuransi sosial beriuran, program dan kebijakan pasar tenaga kerja, dan layanan sosial. Untuk mencapai hasil optimal, diperlukan mekanisme pemberian program dan layanan yang dirancang dengan baik untuk mendukung proses bisnis, mulai dari identifikasi, pendaftaran, penanganan keluhan, pembayaran, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan penargetan dan desain yang tepat, program Perlindungan Sosial dapat memperlancar konsumsi rumah tangga miskin dan memberikan perlindungan risiko yang efektif terhadap guncangan yang terjadi sepanjang siklus hidup, seperti disabilitas, pengangguran, kematian, dan lain-lain.

**Berbagai negara di dunia berupaya meningkatkan responsivitas sistem Perlindungan Sosial mereka terhadap berbagai tantangan tersebut dengan menerapkan Perlindungan Sosial Adaptif (ASP).** ASP membantu *“membangun ketahanan rumah tangga yang rentan terhadap guncangan melalui investasi langsung yang membantu meningkatkan kapasitas untuk bersiap menghadapi, mengatasi, dan beradaptasi terhadap guncangan: melindungi kesejahteraan dan memastikan agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan atau terjebak dalam kemiskinan akibat dampak tersebut.”* Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut seefektif mungkin, negara-negara tersebut memanfaatkan aspek-aspek utama dari sistem Perlindungan Sosialnya masing-masing. ‘Aspek-aspek’ utama ASP mencakup (i) program dan sistem pemberian layanan; (ii) data dan informasi; (iii) keuangan; dan (iv) pengaturan kelembagaan dan kemitraan. Aspek-aspek tersebut sangat penting untuk memastikan pembangunan ketahanan dan tanggap darurat yang efektif terhadap dampak negatif guncangan, khususnya bagi kelompok yang lebih rentan.

**Oleh karena itu, mekanisme yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji kebutuhan rumah tangga yang terkena bencana menjadi sangat penting.** Dalam memberikan bantuan sosial kepada penerima manfaat yang sudah ada dan yang baru selama dan setelah krisis, langkah yang umumnya diambil adalah peningkatan manfaat perlindungan sosial secara otomatis atau cepat bagi penerima manfaat yang sudah ada (ekspansi vertikal) dan bagi penerima manfaat baru (ekspansi horizontal). Meskipun program

perlindungan sosial umumnya menyertakan instrumen penargetan dan identifikasi penerima manfaat perlindungan sosial reguler (misalnya bantuan sosial), instrumen tersebut mungkin memiliki keterbatasan di kondisi pasca bencana karena biasanya cenderung dirancang untuk mengkaji kemiskinan kronis dan kurang cocok untuk mengkaji perubahan cepat tingkat kesejahteraan yang disebabkan oleh peristiwa guncangan.

**Instrumen pengkajian pasca bencana merupakan alat penting yang digunakan untuk mengumpulkan informasi krusial mengenai kerusakan, kerugian, dan dampak bencana secara menyeluruh.** Informasi tersebut membantu para pembuat kebijakan, organisasi kemanusiaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang tepat terkait alokasi sumber daya dan memprioritaskan upaya tanggap darurat di wilayah yang terkena dampak.

**Berbagai negara dan lembaga telah mengembangkan berbagai instrumen pengkajian pasca bencana yang terus berkembang dalam beberapa dekade terakhir.** Pengkajian pasca bencana awalnya hanya difokuskan pada pengkajian kerusakan dan kerugian secara kuantitatif untuk menginformasikan pemulihan ekonomi. Namun, pengkajian kerusakan dan kerugian saja dianggap tidak cukup untuk memahami proses pemulihan yang multi dimensi, seperti terkait aspek ekonomi, produktif, komersial, dan sosial. Negara-negara tersebut mengadopsi instrumen pengkajian yang berbeda-beda untuk menginformasikan upaya tanggap darurat kemanusiaan, dan masing-masing instrumen tersebut memiliki fitur dan karakteristik yang berbeda. Instrumen-instrumen tersebut dapat mengkaji dampak tingkat makro (seperti pengkajian kebutuhan pasca bencana atau *Post-Disaster Needs Assessment* (PDNA)); dampak sektoral (misalnya survei perusahaan, survei kerusakan bangunan, dll.), atau dampak di tingkat masyarakat dan rumah tangga yang dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak bencana pada infrastruktur, pemberian layanan, aktivitas ekonomi, mata pencaharian, dan kesejahteraan. Daftar berikut ini merangkum instrumen-instrumen pengkajian pasca bencana yang paling umum digunakan di berbagai negara, yang diurutkan dari cakupan umum ke cakupan spesifik.

- a. **Tinjauan Situasi Awal:** umumnya mencakup pemindaian udara atau citra satelit untuk mengidentifikasi area yang terkena dampak dan skala dampaknya, biasanya dalam beberapa jam setelah kejadian.
- b. **Pengkajian Kerusakan dan Kerugian atau *Damage and Loss Assessment* (DaLA):** bertujuan untuk mendapatkan perkiraan terdekat terkait kerusakan dan kerugian akibat peristiwa bencana. Instrumen ini sebagian besar telah digantikan oleh pengkajian kebutuhan pasca bencana (PDNA).
- c. **Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana atau *Post-Disaster Needs Assessment* (PDNA):** penilaian tingkat makro untuk memperkirakan keseluruhan kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh bencana di berbagai sektor; dan
- d. **Pengkajian Rumah Tangga Pasca Bencana:** diterapkan di tingkat rumah tangga untuk memfasilitasi pemahaman tentang kebutuhan dan dampak di tingkat rumah tangga

**Pengkajian Rumah Tangga Pasca Bencana atau *Post-Disaster Household Assessment* (PDHA) adalah pengkajian tingkat rumah tangga yang dilaksanakan setelah bencana, bertujuan untuk menginformasikan upaya tanggap darurat pemerintah dan kemanusiaan, untuk membantu rumah tangga yang terkena dampak bencana, termasuk melalui perlindungan sosial.** Pengkajian ini memiliki nama yang berbeda-beda di berbagai negara namun memiliki beberapa elemen dasar yang sama. Pertama, PDHA diterapkan hanya di tingkat rumah tangga, umumnya pada rumah tangga yang terkena dampak yang telah diidentifikasi sebelumnya atau seluruh rumah tangga di wilayah yang terkena dampak. Variabel-variabel dalam pengkajian ini bervariasi dalam hal jumlah dan kompleksitas, namun umumnya bertujuan untuk mengkaji kebutuhan, kerusakan, dan dampak bencana terhadap rumah tangga dan penghuninya pasca bencana. Informasi dari pengkajian ini biasanya digunakan untuk menilai skala dampak bencana di tingkat rumah tangga dan menentukan jenis dukungan apa yang harus diberikan kepada rumah tangga yang terkena dampak untuk mengatasi dampak bencana terhadap kesejahteraan dan mata pencaharian mereka. Yang terakhir, PDHA dapat diterapkan oleh berbagai pihak dalam konteks pasca bencana, seperti pemerintah, lembaga kemanusiaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan pihak-pihak lainnya. Jika dirancang

dengan baik, instrumen ini didukung oleh sistem informasi khusus, sehingga dapat memanfaatkan interoperabilitas untuk perencanaan *ex-ante* dan verifikasi *ex-post*, serta dapat berbagi data ke berbagai lembaga untuk menghindari tumpang tindih dalam pengumpulan data dan memfasilitasi tanggap darurat yang terkoordinasi.

**Terdapat beberapa prinsip pedoman penggunaan PDHA yang efektif, khususnya jika digunakan untuk mendukung tujuan ASP, yang meliputi:**

- a. PDHA harus mencakup seluruh rumah tangga yang terkena dampak di wilayah yang terkena dampak secara optimal.
- b. Data PDHA yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan penggunaannya. Secara khusus, PDHA harus menghindari penambahan beban bagi rumah tangga yang sudah terkena dampak dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dalam menginformasikan upaya tanggap darurat yang menjawab kebutuhan mereka.
- c. Data PDHA harus akurat dan dilengkapi dengan mekanisme verifikasi dan validasi data yang dikumpulkan dari rumah tangga, baik di lokasi maupun *ex-post*. Hal ini termasuk mengadopsi proses pengumpulan dan verifikasi data bagi rumah tangga pengungsi yang mungkin berada di tempat penampungan dan lokasi lain di luar lokasi bencana.
- d. PDHA harus seoptimal mungkin dikumpulkan secara elektronik, dengan fitur-fitur yang mendukung beragam metode pengumpulan data (ponsel, tablet), dilengkapi dengan fungsi luring dan cadangan data berbasis kertas mengingat ketidakpastian lingkungan operasi pasca bencana.
- e. Data yang dikumpulkan dari PDHA harus disimpan dalam sistem informasi khusus dengan pengaturan interoperabilitas dengan SP yang ada dan sistem informasi lain yang relevan. Fungsi interoperabilitas tersebut dapat membantu melengkapi data yang dikumpulkan di lapangan, memverifikasi data yang terkumpul, dan mendukung penyediaan SP dan upaya tanggap darurat sektoral lainnya bagi rumah tangga yang terkena dampak.
- f. Data PDHA harus dapat dibagikan ke seluruh lembaga untuk menghindari duplikasi dan terlalu banyak beban wawancara bagi rumah tangga yang terkena dampak.
- g. Yang terakhir, administrasi sistem PDHA harus memiliki pengaturan kelembagaan yang jelas dalam penerapannya, termasuk siapa yang memegang tanggung jawab administratif atas proses dan sistem yang terkait, lembaga mana yang mendukung penerapannya, dan siapa yang dapat menggunakan dan mengakses data yang dikumpulkan.

**Penting untuk dicatat bahwa, secara konvensional, PDHA dirancang untuk memberikan gambaran statis mengenai kebutuhan dan dampak rumah tangga pasca bencana. Oleh karena itu, negara-negara sebaiknya mengeksplorasi berbagai mekanisme tambahan agar proses PDHA lebih dinamis, sehingga dapat memfasilitasi pemantauan berkelanjutan terhadap kesejahteraan dan pemulihan.** Hal tersebut dapat membantu mengevaluasi efektivitas bantuan pasca bencana dalam memfasilitasi pemulihan, mengidentifikasi perubahan kondisi rumah tangga yang terkena dampak dari waktu ke waktu, dan menentukan apakah diperlukan dukungan tambahan untuk memulihkan dan meningkatkan kondisi kesejahteraan mereka pasca guncangan.



# Studi Kasus dan Praktik Terbaik Global

## 1. Chili: File Darurat Dasar (*Ficha Básica de Emergencia - FIBE*)

Instrumen PDHA FIBE Chili<sup>1</sup> merupakan salah satu contoh praktik terbaik, terutama karena pengalaman panjang negara tersebut atas penerapan PHDA dan penggunaan manajemen elektronik, interoperabilitas, dan mekanisme berbagi data. Chili telah menerapkan pengkajian PDHA sejak tahun 2001 sebagai bagian dari proses pengkajian pasca bencana. Awalnya, pengkajian dilakukan melalui Survei Keluarga Darurat Tunggal (*Encuesta Familiar Única de Emergencia*), yang diimplementasikan dari tahun 2001 hingga 2015. Setelah dilakukan tinjauan sistematis terhadap Survei Keluarga Darurat Tunggal, pengkajian tersebut menjadi File Darurat Dasar (*Ficha Básica de Emergencia - FIBE*) yang diperkenalkan pada tahun 2015. Instrumen FIBE tersebut masih digunakan sampai sekarang. Hasil tinjauan tahun 2015 terhadap instrumen mencatat beberapa kekurangan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dalam data terkait kerentanan disabilitas yang dikumpulkan melalui formulir sebelumnya, keterlambatan dalam penerapan instrumen, keluhan masyarakat mengenai akurasi, dan keterbatasan dalam pengelolaan data elektronik yang terkumpul. Berdasarkan hasil diagnosis tersebut, File Darurat Dasar (FIBE) kemudian ditetapkan melalui Keputusan Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Publik 697/2015, di bawah Rencana Perlindungan Sipil Nasional. Perubahan menjadi FIBE membawa sejumlah perbaikan dalam beberapa aspek, yaitu: (1) perubahan instrumen; (2) platform; (3) komunikasi warga; (4) aplikasi seluler; dan (5) pelatihan, yang dirangkum di bawah ini.<sup>2</sup>

Instrumen FIBE yang berlaku saat ini merupakan formulir singkat satu halaman yang merangkum informasi penting mengenai demografi dan kebutuhan rumah tangga yang terkena dampak bencana.<sup>3</sup> Instrumen ini mengumpulkan data demografi rumah tangga, kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas dan penyakit kronis, dan masyarakat adat, kerusakan dan kerugian perabotan rumah tangga, dll., dampak terhadap lapangan kerja, dan membuat daftar kebutuhan rumah tangga yang diprioritaskan.<sup>4</sup> Penting untuk dicatat bahwa walaupun dibuat singkat (satu halaman), instrumen ini mencakup beberapa variabel yang dapat memberikan gambaran singkat mengenai kondisi rumah tangga yang terkena dampak bencana. Instrumen ini juga mencakup variabel-variabel untuk mengkaji kebutuhan khusus kelompok rentan dalam rumah tangga yang terkena dampak bencana. Informasi yang dikumpulkan menggunakan FIBE digunakan untuk menginformasikan upaya dukungan Pemerintah bagi rumah tangga yang terkena dampak, khususnya dalam upaya tanggap darurat perlindungan sosial. Penerapan instrumen ini pada bencana-bencana sebelumnya berhasil memberikan informasi bentuk tanggap darurat perlindungan sosial, antara lain berupa bantuan barang dan uang tunai bagi rumah tangga yang terkena dampak gempa bumi Coquimbo tahun 2015, serta bantuan tunai untuk tempat tinggal sementara dan kebutuhan dasar bagi rumah tangga yang terkena dampak kebakaran hutan di tiga wilayah pada tahun 2017.<sup>5</sup>

Kementerian Pembangunan Sosial Chili memiliki tanggung jawab untuk menerapkan FIBE, yang diatur dalam kerangka kerja yang jelas untuk mengkoordinasikan pengaturan kelembagaan dari tingkat lokal hingga nasional, serta lintas sektor. Kementerian Pembangunan Sosial memiliki mandat untuk mengelola proses FIBE berdasarkan Rencana Perlindungan Sipil Nasional Chili. Keputusan No. 156/2002 yang menetapkan Rencana Perlindungan Sipil Nasional, dan diperbarui melalui Keputusan No. 697/2015 dan Keputusan No. 1.434/2017, menguraikan pengaturan dan tanggung jawab kelembagaan perlindungan sipil di tingkat nasional, provinsi, dan kota, serta di seluruh fase DRM. Rencana tersebut mencakup penetapan peran dan tanggung jawab Kementerian Pembangunan Sosial (di antara pihak-pihak lainnya), khususnya terkait penerapan FIBE. FIBE melengkapi instrumen pengumpulan data resmi lainnya yang mengumpulkan informasi terkait dampak bencana.<sup>6</sup> Yang terpenting, instrumen

FIBE diterapkan sesuai dengan protokol yang disesuaikan dengan tingkat bencana di bawah kerangka DRM Chili, yang mencakup (i) Tingkat 1 – darurat lokal; (ii) Tingkat 2 – darurat masyarakat; (iii) Tingkat 3 – darurat sub nasional; dan (iv) Level 4 – darurat nasional. Pemerintah kota bertanggung jawab atas administrasi instrumen untuk darurat Tingkat 1 dan 2, dan berkoordinasi dengan Sekretariat Kementerian Sub Nasional dari Kementerian Pembangunan Sosial untuk darurat Tingkat 3. Untuk darurat nasional Tingkat 4, proses penerapan FIBE dikelola langsung oleh Kementerian Pembangunan Sosial di tingkat pusat.<sup>7</sup> Untuk pengumpulan data, proses FIBE umumnya dikelola oleh petugas pemerintah, termasuk pekerja sosial dan staf kementerian perlindungan sosial lainnya (petugas sosial, promotor sosial, dll.).<sup>8</sup> Salah satu fitur penting dari pengaturan kelembagaan FIBE adalah pelaksanaan pelatihan penerapan instrumen yang berkelanjutan. Setiap tahun, Kementerian Pembangunan Sosial menyelenggarakan pelatihan untuk mengakreditasi pewawancara melalui *e-learning*, yang dilengkapi dengan pelatihan tatap muka sekitar dua kali setahun. Proses pelatihan tersebut didukung oleh Manajer Keadaan Darurat Sub Nasional di tingkat provinsi dan masyarakat.<sup>9</sup> Dan yang terakhir, terdapat platform daring terpusat yang memungkinkan akses bagi semua departemen pemerintah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari dataset FIBE.<sup>10</sup>

**Fitur penting lainnya dari instrumen FIBE adalah kemampuan untuk mereferensi silang data yang dikumpulkan dengan pencatatan sosial rumah tangga di Chili (*Registro Social de Hogares*) dan mekanisme berbagi data lain yang bermanfaat.** Pencatatan sosial di Chili, yang dikelola oleh Kementerian Pembangunan Sosial, mencakup sekitar 75 persen populasi dan merupakan sumber utama persyaratan penerima manfaat untuk semua program sosial di negara tersebut.<sup>11</sup> Informasi yang dikumpulkan melalui FIBE diperiksa silang dengan data pencatatan sosial selama fase darurat untuk melengkapi data pribadi, memperbaiki kesalahan, dan memvalidasi data yang dikumpulkan.<sup>12</sup> Setelah keadaan darurat, data FIBE direferensi silang dengan data pencatatan sosial untuk dianalisis, termasuk untuk menghitung populasi yang terkena dampak menurut klasifikasi sosial ekonomi (tingkat kemiskinan) dalam pencatatan sosial. FIBE juga dilengkapi dengan fitur lainnya, seperti aplikasi FIBE seluler, yang mampu mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengumpulan data sebesar 50 persen dibandingkan metode tradisional.<sup>13</sup> Fitur ini memungkinkan Kementerian Pembangunan Sosial untuk menanggapi keadaan darurat dengan lebih cepat dan efektif serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak secara tepat waktu. Selain itu, platform daring yang dijelaskan sebelumnya juga memungkinkan lembaga pemerintah lainnya untuk mengakses data FIBE. Dan yang terpenting, masyarakat memiliki akses terhadap data yang dikumpulkan dari FIBE melalui situs publik yang menyediakan data keadaan darurat.

## **2. Pengkajian Dampak dan Kebutuhan Bencana Rumah Tangga Jamaika (JHDINA)**

**Pengkajian Dampak dan Kebutuhan Bencana Rumah Tangga Jamaika (JHDINA) adalah contoh yang menunjukkan PDHA dengan peran kepemimpinan yang jelas dari Kementerian yang bertanggung jawab atas Perlindungan Sosial, berkoordinasi dengan berbagai Kementerian Pemerintah dan lembaga non-pemerintah di bawah kerangka DRM negara tersebut.** Kerangka DRM Jamaika secara institusional disusun berdasarkan Dewan Manajemen Risiko Bencana Nasional (NDRMC), yang berfungsi sebagai badan pengawas dan teknis yang memberikan arahan dalam tanggap darurat nasional terhadap bencana. NDRMC memiliki tujuh komite, antara lain Komite Bantuan Kemanusiaan (HAC) multi-sektoral, yang diketuai oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial (MLSS). Badan Manajemen Risiko Bencana Jamaika, yaitu Kantor Kesiapsiagaan Bencana dan Manajemen Darurat (ODPEM), berfungsi sebagai Koordinator Nasional NDRMC dan juga merupakan bagian dari HAC. Tanggung jawab HAC mencakup kesejahteraan, pengelolaan bantuan, serta penanganan permasalahan pengungsi.<sup>14</sup> Secara operasional, pekerja sosial memimpin tim bantuan kemanusiaan multi-sektoral yang terdiri dari pemangku kepentingan pemerintah dan non-pemerintah, untuk melaksanakan pengkajian JHDINA terhadap rumah tangga yang terkena dampak.<sup>15</sup>

Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Jamaika (MLSS) memimpin penerapan instrumen JHDINA, yang dikembangkan setelah melalui proses penyempurnaan instrumen pengumpulan data PHDA sebelumnya. Tujuan utama JHDINA adalah memberikan informasi untuk mendukung penyediaan bantuan perlindungan sosial dari Pemerintah kepada rumah tangga yang terkena dampak bencana. Sebelum JHDINA, instrumen yang digunakan adalah formulir Pengkajian Kerusakan Rumah Tangga berbasis kertas yang diterapkan berdasarkan kerangka HAC. Namun, data yang dikumpulkan instrumen tersebut sangat terbatas dan fokus utamanya adalah pada kerusakan fisik pada struktur rumah untuk menentukan jumlah bantuan yang akan diterima. Tinjauan<sup>16</sup> terhadap Pengkajian Kerusakan Rumah Tangga pada tahun 2017 mencatat beberapa keterbatasan, yang mencakup fokus pada kerusakan fisik tanpa partisipasi para ahli bangunan dalam proses pengumpulan data, pengumpulan data berbasis kertas memerlukan waktu yang lebih lama untuk menyalin data sehingga memperlambat upaya tanggap darurat, dan tidak mengumpulkan data mengenai variabel-variabel lebih luas yang relevan untuk tanggap darurat perlindungan sosial.<sup>17</sup> Setelah tinjauan tersebut, instrumen JHDINA tersebut direvisi dengan penambahan fitur-fitur yang mencakup lebih banyak variabel untuk menginformasikan berbagai upaya tanggap darurat potensial di luar perlindungan sosial; kemampuan pengumpulan data daring dan luring yang dilengkapi dengan desain sistem informasi khusus dan kemampuan pengambilan foto. Yang terpenting, variabel-variabel baru tersebut dimasukkannya ke dalam instrumen berdasarkan hasil konsultasi multi-sektor yang mengerucutkan daftar variabel-variabel yang akan berguna bagi upaya tanggap darurat para anggota HAC.<sup>18</sup> Data JHDINA juga disampaikan ke Kementerian Keuangan melalui Badan Perencanaan Jamaika (PIOJ) untuk menginformasikan pengambilan keputusan di tingkat pusat setelah terjadinya bencana.

### **3. Indonesia: WelTrAC - dari pengkajian statis menjadi pemantauan kesejahteraan berkelanjutan**

Instrumen Penelusuran Kesejahteraan Pasca Krisis Bank Dunia atau *World Bank's Welfare Tracking in the Aftermath of Crisis (WelTrAC)* adalah salah satu contoh pengkajian rumah tangga pasca bencana yang memfasilitasi pemantauan berkelanjutan terhadap dinamika kesejahteraan dan kebutuhan bantuan bagi para korban yang terkena dampak bencana, dengan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengumpulan dan analisis data. Instrumen tersebut telah diujicobakan untuk bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Sulawesi Tengah yang melanda Indonesia pada bulan September 2018. Bencana tersebut merupakan peristiwa bencana terdahsyat yang melanda Indonesia sejak gempa bumi dan tsunami Samudera Hindia tahun 2004. Peristiwa bencana di Sulawesi Tengah tersebut menyebabkan sekitar 4.140 korban jiwa, 4.438 orang luka-luka, dan 201.042 orang mengungsi. Bencana tersebut juga menyebabkan kerugian ekonomi sebesar US\$1,3 miliar, yang diperkirakan mencapai 13,7 persen PDB Sulawesi Tengah.

Instrumen WelTrAC dikembangkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengumpulkan data *real-time* mengenai kebutuhan bantuan bagi rumah tangga yang terkena dampak. Tantangan tersebut termasuk identifikasi jenis, jumlah, lokasi, dan penerima bantuan darurat yang dibutuhkan, serta bantuan tahap pemulihan dan rekonstruksi selanjutnya. Pada saat itu, ketidakmampuan untuk mengumpulkan data secara tepat waktu dinilai sebagai salah satu tantangan dalam menentukan strategi tanggap darurat yang efektif, dan mengakibatkan proses pemulihan dan rekonstruksi yang terlalu lama. Tujuan WelTrAC adalah untuk menjembatani kesenjangan informasi tentang cakupan bantuan yang dibutuhkan oleh para korban bencana, yang harus diberikan Pemerintah secara memadai dan tepat waktu di setiap fase tanggap darurat bencana.

Instrumen WelTrAC menggunakan kombinasi data survei panel rumah tangga dan data citra satelit penginderaan jarak jauh untuk mengintegrasikan analisis tingkat mikro dan makro, dilengkapi dengan dasbor pemantauan berbasis web interaktif untuk menyajikan temuan terkini secara berkala. WelTrAC telah diterapkan selama dua tahun untuk mendukung Pemerintah dalam upaya

pemberian bantuan bencana, pemulihan, dan pembangunan ketahanan. Dalam jangka pendek, WelTrAC mengumpulkan informasi kondisi kehidupan yang hampir *real-time*, yang diperlukan untuk menargetkan upaya tanggap darurat dan untuk meningkatkan pengetahuan tentang mekanisme koping. Dalam jangka menengah, survei WelTrAC mengumpulkan data rutin mengenai dinamika kesejahteraan dan mata pencaharian selama fase pemulihan dan rekonstruksi untuk lebih memahami cara kerja intervensi yang diambil, sedangkan citra satelit digunakan untuk mengukur laju rekonstruksi dan sejauh mana hal tersebut membantu mendorong pemulihan kesejahteraan.

**WelTrAC mengumpulkan beragam data rumah tangga, termasuk terkait perlindungan sosial, pembangunan sumber daya manusia, perumahan, dan tenaga kerja.** Survei ini mencakup lima putaran survei panel rumah tangga terhadap 1.200 rumah tangga yang terkena dampak di kabupaten Palu, Donggala, dan Sigi antara April 2019 hingga Oktober 2020. Metode pengumpulan data mencakup kombinasi wawancara tatap muka dan telepon. Wawancara tersebut menggunakan kuesioner multi topik terkait informasi tentang karakteristik demografi rumah tangga, perumahan dan akses ke fasilitas dasar, aset, akses ke pendidikan, kondisi kesehatan dan akses ke layanan kesehatan, pekerjaan, strategi koping, dan akses terhadap bantuan pemerintah.

**Inovasi utama WelTrAC adalah penggunaan data citra satelit resolusi tinggi, dan serangkaian peta cakupan lahan sebelum dan sesudah kejadian bencana, serta selama periode pemulihan.** Inovasi tersebut memungkinkan instrumen WelTrAC untuk: (i) melacak laju pemulihan fisik, karena karakteristik observasi yang berskala besar dan dinamis; dan (ii) mengkaji sejauh mana laju pemulihan fisik mampu mendukung laju pemulihan rumah tangga pasca bencana. Hal ini merupakan upaya pertama pemetaan serangkaian data jangka panjang pada wilayah yang luas dengan menggunakan citra spasial beresolusi tinggi untuk memantau kemajuan pembangunan kembali pasca bencana.

**WelTrAC menawarkan metode pengumpulan data dan instrumen yang inovatif dan berkelanjutan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam upaya tanggap bencana dan pengurangan risiko yang efektif.** Instrumen WelTrAC menghasilkan data berharga mengenai dampak bencana jangka pendek dan menengah terhadap kesejahteraan dan mata pencaharian masyarakat yang terkena dampak, serta mengenai kinerja tanggap darurat perlindungan sosial terhadap pemulihan kesejahteraan rumah tangga yang terkena dampak. Studi WelTrAC atas tanggap bencana di Sulawesi Tengah mampu mengkaji laju pemulihan kesejahteraan, sumber daya manusia, dan lapangan kerja di antara rumah tangga yang terkena dampak; serta strategi koping yang digunakan masyarakat, seperti pengurangan konsumsi makanan sebagai strategi yang paling umum diadopsi oleh rumah tangga di 40 persen distribusi pendapatan terbawah. Terkait penyalurannya, studi ini menyoroti keterlambatan pemberian bantuan sosial reguler dan bantuan darurat setelah bencana. Selain itu, citra satelit juga membantu proses pengkajian kerusakan bangunan dan infrastruktur di seluruh kabupaten yang terkena dampak dan memantau kemajuan pembangunan kembali di daerah yang terkena dampak. Konfirmasi penting dari studi ini adalah bahwa kecepatan rekonstruksi infrastruktur fisik merupakan faktor penting dalam mendukung laju pemulihan rumah tangga pasca bencana. Temuan menarik dari studi ini adalah bahwa dalam waktu satu tahun setelah bencana, kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan masih belum sepenuhnya pulih ke tingkat sebelum bencana. Temuan ini dan temuan-temuan lainnya dijelaskan lebih lanjut dalam [laporan WelTrAC](#).

## Hasil Temuan:

**Pemerintah Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat dalam memberikan berbagai manfaat dan layanan bantuan sosial darurat kepada rumah tangga dan individu yang terkena dampak bencana, dan berpengalaman dalam melakukan pengkajian pasca bencana, terutama di tingkat makro.** Manfaat bantuan sosial darurat pada dasarnya dikelola dan disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), sesuai mandatnya sebagai penyedia perlindungan dan bantuan sosial bagi rumah tangga yang terkena



dampak dan rumah tangga yang membutuhkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga memberikan bantuan darurat sesuai perannya sebagai koordinator pelaksanaan penanggulangan bencana nasional. Selain itu, berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah juga turut melakukan pengkajian di tingkat makro, masyarakat, dan rumah tangga setelah terjadinya bencana besar maupun kecil, dengan memanfaatkan kekayaan pengetahuan konteks pasca bencana yang tersedia.

**Pemerintah juga secara aktif mengadopsi berbagai instrumen pengkajian pasca bencana untuk memahami beragam kebutuhan pasca bencana; namun, instrumen-instrumen tersebut lebih banyak diterapkan di tingkat makro dan sektoral, dan jarang diterapkan untuk mengkaji kebutuhan di tingkat rumah tangga dan individu.** Berbagai metodologi yang berfokus pada pemulihan telah dikembangkan untuk mengidentifikasi kebutuhan transisi dan pemulihan awal dari masyarakat yang terkena dampak. Meskipun Indonesia memiliki sekitar 20 tahun pengalaman dalam pengkajian kebutuhan pasca bencana (PDNA) dan topik serupa, temuan terkait pengkajian pasca bencana di tingkat rumah tangga masih sangat terbatas. Pengumpulan data di tingkat rumah tangga masih terintegrasi sebagai bagian dari PDNA, sehingga variabel datanya cukup terbatas. Selain itu, terdapat beragam pengkajian pasca bencana yang diterapkan oleh berbagai kementerian atau lembaga, sehingga mengakibatkan instrumen dan metodologi yang saling tumpang tindih.

**Masih terdapat beberapa tantangan yang menghambat pengumpulan data tingkat rumah tangga konteks pasca bencana yang efektif. Sedangkan, pengumpulan data yang efektif dapat meningkatkan relevansi dan kelengkapan data tersebut untuk menginformasikan upaya tanggap darurat perlindungan sosial di tingkat rumah tangga terhadap guncangan.** Sebagian besar pengkajian kebutuhan pasca bencana (PDHA) tidak dilakukan di tingkat rumah tangga. Dalam penerapannya, pengumpulan data PDHA tidak selalu dilakukan secara elektronik. Selain itu, proses PDHA juga belum memanfaatkan beragam basis data yang tersedia di Indonesia untuk membantu meningkatkan efisiensi pengumpulan, pembagian, dan pemutakhiran data. Isu terbesarnya adalah informasi yang dikumpulkan dari pengkajian di tingkat rumah tangga umumnya masih terbatas dan tidak selalu dikaitkan secara sistematis dengan penyediaan bantuan sosial darurat. Kemudian, instrumen PDHA tidak selalu mengumpulkan informasi tentang kebutuhan-kebutuhan krusial yang dapat menginformasikan bentuk bantuan yang tepat dan relevan bagi rumah tangga yang terkena dampak. Dan terakhir, pembagian data juga masih terbatas, sehingga menyebabkan proses yang terfragmentasi. Berbagai instrumen dan upaya tanggap darurat yang saling tumpang tindih dapat menambah beban bagi rumah tangga terkena dampak yang sudah kesulitan untuk menjawab berbagai macam kuesioner, yang dapat membuat frustrasi jika tidak membuahkan bantuan.

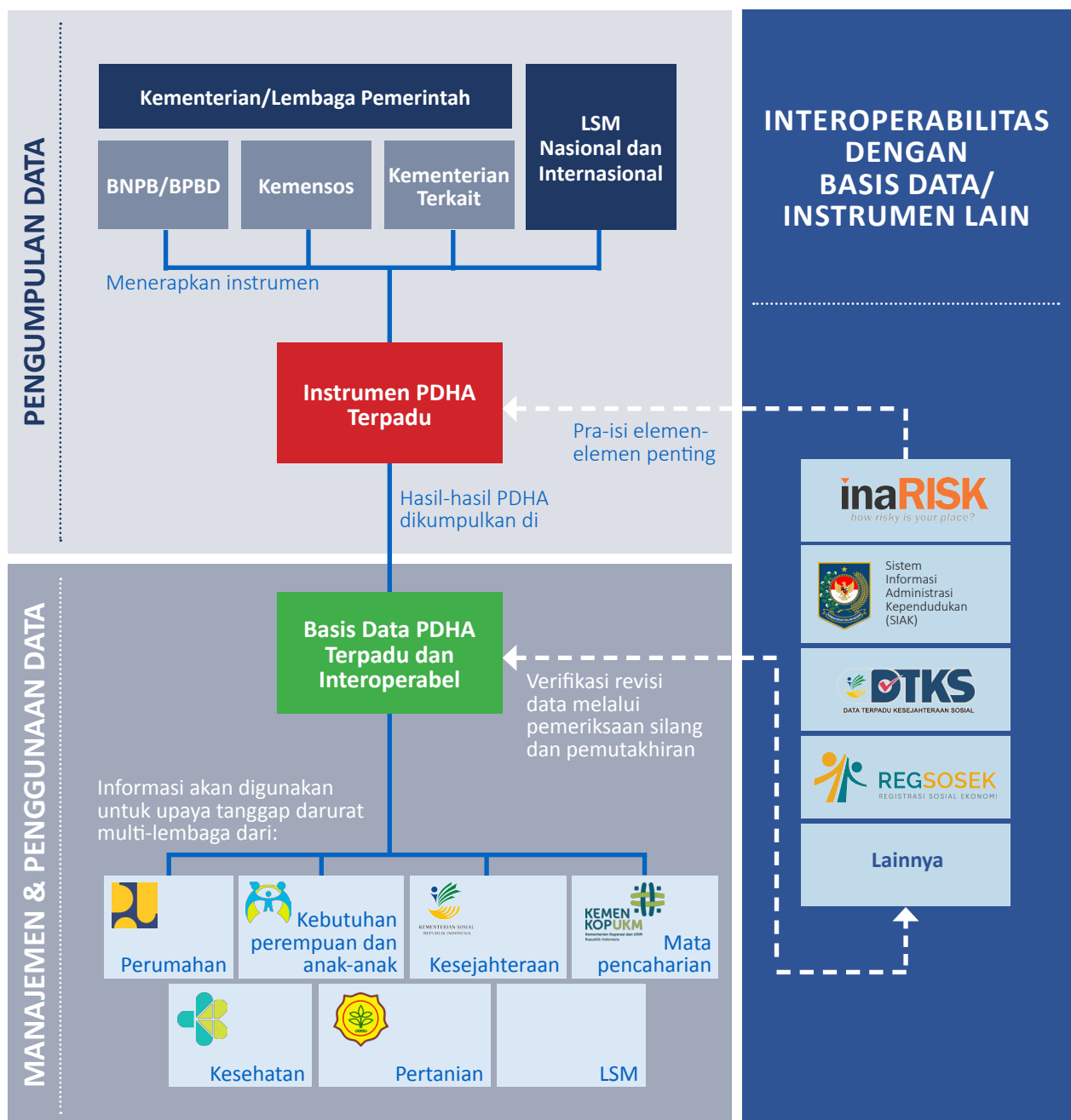
## *Langkah-langkah Selanjutnya:*

**Berdasarkan hasil temuan tersebut, laporan ini merekomendasikan agar Pemerintah Indonesia mempertimbangkan pengembangan model Pengkajian Rumah Tangga Pasca Bencana (PDHA) yang terintegrasi, dengan peran kelembagaan, pengaturan koordinasi, mekanisme interoperabilitas, dan variabel-variabel potensial yang jelas untuk menginformasikan penentuan upaya tanggap darurat tingkat rumah tangga yang lebih efektif.** Model ini menggunakan instrumen PDHA tunggal dan terpadu yang diterapkan pada rumah tangga yang terkena dampak bencana. Data dari PDHA terpadu tersebut kemudian dapat disediakan bagi beragam pemangku kepentingan, untuk menginformasikan upaya tanggap darurat terkait perlindungan sosial dan juga sektor lainnya bagi rumah tangga yang terkena dampak. Dengan demikian, PDHA terpadu tersebut akan dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai kesejahteraan sosial dan kebutuhan bantuan bagi rumah tangga yang terkena dampak bencana, sehingga memungkinkan adanya upaya tanggap darurat yang terpadu dan terinformasi dari semua pemangku kepentingan terkait. Kerangka kerja PDHA dapat mencakup beragam pemangku kepentingan, termasuk kementerian/lembaga yang berwenang dalam pengkajian kebutuhan pascabencana serta LSM internasional dan nasional, untuk meningkatkan efektivitas, mencegah fragmentasi dan duplikasi upaya pengumpulan data, dan meningkatkan efisiensi proses PDHA. Data dari proses PDHA idealnya

harus dikonsolidasikan ke dalam basis data terpadu yang dapat digunakan oleh berbagai lembaga untuk menginformasikan upaya tanggap darurat yang terkoordinasi. Agar optimal, proses tersebut juga harus memanfaatkan fungsi interoperabilitas dengan basis data lain untuk pra-isi (*pre-populate*) data rumah tangga yang terkena dampak sebelum proses pengumpulan data, untuk proses verifikasi, dan untuk pemutakhiran data *ex-post*. Pengembangan basis data tersebut dapat memberikan banyak manfaat, termasuk kemudahan akses bagi pemangku kepentingan terkait untuk memutakhirkan data kebutuhan rumah tangga secara sistematis dan berkala. Pemutakhiran berkala pasca guncangan melalui model pelacakan kesejahteraan yang dibangun berdasarkan proses PDHA, juga dapat meningkatkan pemantauan dan pelacakan pemulihan di antara rumah tangga yang terkena dampak dan dampak dari bantuan yang diberikan.

**GAMBAR 1:**

Pilihan Model Terpadu untuk PDHA dan Pelacakan Kesejahteraan di Indonesia



**TABEL 1:**

## Usulan Peran-Peran dalam Model Terkoordinasi untuk PDHA Terpadu di Indonesia

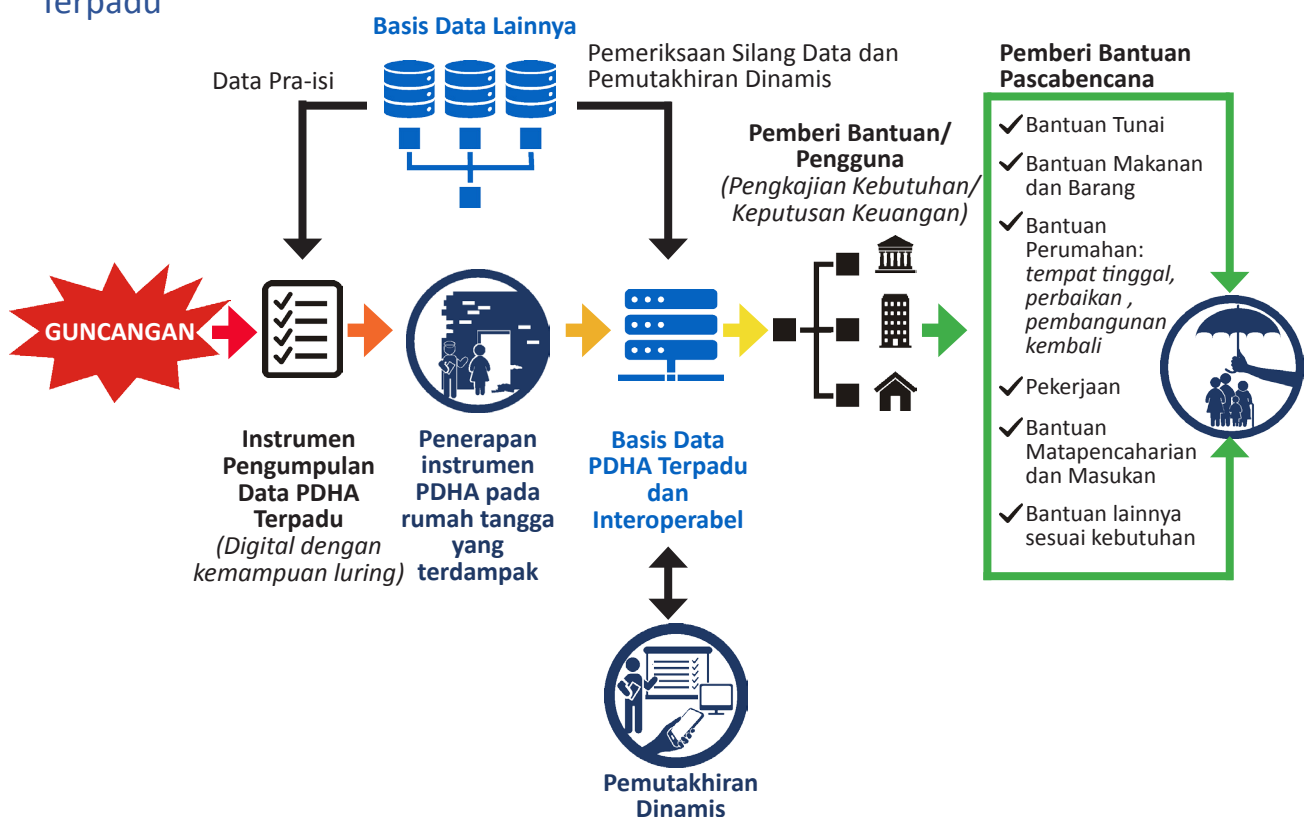
Fungsi	Deskripsi
<b>Koordinator</b>	Penting untuk memastikan adanya peran koordinasi dan pengawasan atas keseluruhan proses PDHA, termasuk untuk menetapkan pedoman pengelolaan data (yaitu variabel instrumen, pembagian data, privasi data, pemrosesan data), dan menyediakan lingkungan yang memungkinkan untuk menghubungkan hasil-hasil PDHA dengan pemberian bantuan sosial pasca bencana dan manfaat bencana lainnya kepada rumah tangga. Selain itu, koordinator juga harus berperan dalam mendukung pengembangan kapasitas yang berkelanjutan di antara para pemangku kepentingan.
<b>Pengumpul Data</b>	Pengumpul data akan bertanggung jawab atas pengumpulan data melalui sumber daya manusia di lapangan, yang optimalnya mencakup sumber daya manusia dari kementerian/ lembaga dan LSM. Pengumpulan data harus mengikuti protokol pengumpulan data dan mekanisme pembagian data yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memastikan kualitas data dan mencegah tumpang tindih.
<b>Penyedia Bantuan/ Pengguna</b>	Penyedia Bantuan/Pengguna menggunakan data yang dikumpulkan dari PDHA untuk menginformasikan penyaluran bantuan sosial pasca bencana dan manfaat perlindungan sosial (atau sektor lainnya jika relevan), yang disesuaikan dengan kebutuhan sektoral. Penting untuk dicatat bahwa <b>penyedia bantuan dapat memutuskan untuk segera mengisi ulang manfaat bagi penerima manfaat terdaftar yang terkena dampak (perluasan vertikal) tanpa menunggu data PDHA</b> . Selain pemerintah, penyedia bantuan juga dapat mencakup lembaga kemanusiaan internasional. Penggunaan dapat diperkenalkan secara bertahap untuk memungkinkan penyesuaian operasional sesuai kebutuhan.
<b>Penyedia Data</b>	Penyedia data adalah kementerian dan lembaga yang menyimpan data yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses PDHA dan berpartisipasi dalam pembagian data, baik <i>ex-ante</i> sebelum pendataan PDHA dilakukan, maupun <i>ex-post</i> . Penyedia data tersebut dapat terlibat atau tidak terlibat dalam pengumpulan data atau penggunaan data. Penyedia data potensial antara lain adalah Dukcapil untuk membantu verifikasi identitas, DTKS dan Regsosek untuk pra-isi data rumah tangga dan verifikasi <i>ex-post</i> , dll.
<b>Pemantauan dan Evaluasi</b>	Penanggung jawab peran pemantauan dan evaluasi harus ditunjuk untuk menilai efektivitas pelaksanaan PDHA secara keseluruhan, mengidentifikasi kesenjangan dan area-area yang perlu ditingkatkan, dan memastikan bahwa kebutuhan rumah tangga yang terkena dampak terpenuhi.

Terdapat beberapa pertimbangan penting dalam memutuskan variabel-variabel yang akan dimasukkan dalam instrumen PDHA terpadu. Variabel-variabel tersebut dapat dikumpulkan melalui pengumpulan data langsung atau pembaruan data yang memanfaatkan mekanisme interoperabilitas, atau keduanya. Dalam memutuskan variabel mana yang harus dimasukkan, penting untuk mengkaji (i) jenis informasi yang krusial untuk menginformasikan upaya perlindungan sosial dan tanggap darurat sektoral lainnya yang akan menggunakan data PDHA; (ii) data yang berguna untuk dipantau secara berkala selama fase tanggap darurat dan pemulihan dalam siklus bencana; (iii) mengidentifikasi data yang bersifat pra-isi atau dapat diisi sebelumnya (*pre-populated*) dari basis data lain *ex-ante* dan dimutakhirkan secara dinamis *ex-post*; dan (iv) mengkaji ketersediaan sumber daya manusia dan waktu pemrosesan pengumpulan data (optimalnya, melalui uji coba instrumen dalam jangka waktu tertentu). Dan yang terakhir, keputusan mengenai variabel-variabel yang akan dimasukkan ke dalam instrumen PDHA idealnya harus diputuskan berdasarkan hasil diskusi dan kesepakatan di antara para pemangku kepentingan utama.

Penting untuk dicatat bahwa Pemerintah dapat mengambil pendekatan bertahap dalam pelaksanaan PDHA. Hal ini dapat dilakukan dengan memulai proses pengembangan instrumen terpadu dengan lembaga-lembaga utama yang terlibat dalam pengkajian rumah tangga pasca bencana, terutama Kementerian Sosial dan BNPB. Namun, penting untuk dicatat bahwa pendekatan implementasi bertahap tersebut harus tetap melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti pemangku kepentingan yang memberikan manfaat pasca bencana; lembaga yang mengoperasikan basis data dan sistem yang bermanfaat untuk berbagi data (seperti Dukcapil); serta lembaga kebijakan utama seperti Bappenas dan Kementerian Keuangan. Masukan mereka sangat penting untuk memastikan agar rancangan instrumen PDHA sesuai dengan tujuan dan bermanfaat bagi lembaga-lembaga pengguna potensial. Konsultasi tersebut juga akan meminimalkan kebutuhan akan beberapa perubahan *ex-post* setelah instrumen dirancang.

## GAMBAR 2:

### Rantai Penyediaan End-To-End Untuk Pengkajian Rumah Tangga Pascabencana Terpadu



Sumber: Adaptasi penulis berdasarkan *Perlindungan Sosial Adaptif dan Manajemen Risiko Bencana: Studi Kasus di Jepang (Adaptive Social Protection and Disaster Risk Management: A Case Study of Japan)*. Bank Dunia dan GFDRR, 2020.



**Jika diterapkan, model Pengkajian Rumah Tangga Pasca Bencana terpadu dapat membantu Pemerintah Indonesia dalam memberikan upaya tanggap darurat terkait perlindungan sosial dan sektor lainnya bagi rumah tangga yang terkena dampak bencana secara lebih efektif.** Pertama, model PDHA terpadu akan memungkinkan Pemerintah untuk menanggapi rumah tangga yang terkena dampak melalui perlindungan sosial dan manfaat serta layanan lain yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Jika dilengkapi dengan langkah-langkah pemutakhiran berkelanjutan, seperti yang direkomendasikan dalam laporan ini, proses tersebut akan membantu Pemerintah memantau dengan lebih baik perubahan kebutuhan rumah tangga yang terkena dampak dari waktu ke waktu dan menilai kinerja upaya tanggap darurat terhadap pemulihan rumah tangga. Yang terpenting, proses baru yang sepenuhnya terintegrasi dan digital akan meningkatkan efisiensi dengan mengurangi tumpang tindih, meningkatkan koordinasi kelembagaan, dan memfasilitasi pemutakhiran waktu nyata (*real-time*) untuk pengambilan keputusan kebijakan yang lebih cepat.

# Daftar Pustaka

- Ali, R., dan I. Setiawan. 2022. "Melihat Lebih Jauh dari Tingkat Kemiskinan dan Kerentanan di Indonesia: Menyelaraskan Perlindungan Sosial dengan Sumber Kerentanan terhadap Kemiskinan (*Looking Beyond Aggregate Poverty and Vulnerability Rates in Indonesia: Aligning Social Protection with Sources of Vulnerability to Poverty*)."
- Bank Dunia.
- Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial RI. 2023. "Program Penanggulangan Bencana di Bidang Perlindungan Sosial (*Disaster Management Program in the Field of Social Protection*)."
- Komisi Eropa, dkk. 2018. "Pengkajian Kebutuhan Pascabencana: Pembelajaran dari Pengalaman Satu Dekade (*Post-Disaster Needs Assessment: Lessons from a Decade of Experience*)."
- Faundez. 2019. "Intisari: Diagnosis Sosial Pasca Darurat di Chili (*Nuts and Bolts: Post-emergency Social Diagnosis in Chile*)" dalam V. Barca dan R. Beazley. 2019. "Membangun Sistem Pemerintah untuk Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Terhadap Guncangan: Peran Data dan Informasi Bantuan Sosial (*Building on Government Systems for Shock Preparedness and Response: The Role of Social Assistance Data and Information*)".
- Pemerintah Chili. 2017. "Mengoptimalkan Tanggap Darurat: Diagnosis Sosial dalam Keadaan Darurat (*Optimizando la respuesta frente a la emergencia: Diagnóstico Social en Emergencia*)."
- Presentasi PowerPoint.
- Pemerintah Chili. 2019. "Diagnosis Sosial dalam Keadaan Darurat: Pengalaman Chili (*Diagnóstico Social en Emergencia: Experiencia de Chile*)". Presentasi PowerPoint di Forum Amerika Latin dan Karibia tentang Penguatan Perlindungan Sosial untuk Ketahanan Bencana, Lima Peru.
- Pemerintah Chili. 2023. "[File Darurat Dasar - FIBE \(Ficha Básica de Emergencia\)](#)".
- Pemerintah Jamaika. 2021. "Rencana Izin Bantuan Darurat Nasional - Versi Saku: Untuk Fasilitasi Bantuan Bencana Internasional (*National Emergency Relief Clearance Plan - Pocket Version: For the Facilitation of International Disaster Relief and Assistance*)."
- Bank Pembangunan Asia Dunia. 2022. "Membangun Ketahanan Masyarakat Miskin Perkotaan di Indonesia (*Building Resilience of the Urban Poor in Indonesia*)."
- Membangun Ketahanan Masyarakat Miskin Perkotaan di Indonesia.
- Jeggle, T. dan Boggero, M. 2018. "Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana: Pembelajaran dari Pengalaman Satu Dekade (*Post Disaster Needs Assessment: Lessons from Decade of Experience*)."
- UNDP, GFDRR, Bank Dunia, dan Komisi Eropa.
- Leite, P. dkk. 2017. "Registrasi Sosial untuk Bantuan Sosial dan Lainnya: Catatan Panduan dan Alat Penilaian (*Social Registries for Social Assistance and Beyond: A Guidance Note and Assessment Tool*)."
- (Bank Dunia).
- Lubis, R., B. Satriatna, dan A. Nugroho (naskah tidak diterbitkan, 2021). "Tinjauan Kebijakan dan Sistem Pemberian Tanggap Darurat Perlindungan Sosial Indonesia atas Gempa Bumi dan Tsunami Sulawesi Tengah 2018: Laporan Studi Kualitatif (*Policy and Delivery System Review of Indonesia's Social Protection Response to the 2018 Central Sulawesi Earthquake and Tsunami: Qualitative Study Report*)."
- Bank Dunia.
- Pemerintah Daerah Lumajang. 2022. "Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Erupsi Gunung Semeru Kabupaten Lumajang 2022-2024."
- Kementerian Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial, Pemerintah Jamaika. 2019. "Perlindungan Sosial Adaptif: Membangun Ketahanan: Peran Pekerja Sosial (*Adaptive Social Protection: Building Resilience: The Role of Social Workers*)."
- Presentasi PowerPoint di Forum Amerika Latin dan Karibia tentang Penguatan Perlindungan Sosial untuk Ketahanan Bencana, Lima Peru.

- Kementerian Pembangunan Sosial, Pemerintah Chili. 2016. "Manual Prosedur File Darurat Dasar: Diagnosis Sosial dalam Keadaan Darurat (*Manual de Procedimientos de la Ficha Básica de Emergencia: Diagnostico Social en Emergencia*)."
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2022. "Laporan Situasi Terkini Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat."
- O'Brien, Clare dkk. 2018. "Penelitian Sistem Perlindungan Sosial Responsif Guncangan: Laporan Sintesis (*Shock-Responsive Social Protection Systems Research: Synthesis Report*)."
- Purnamasari, R.S., A. Febriady, B.A. Wirapati, M.N. Farid, P. Milne, Y. Kawasoe, J. Vun, R. Engstrom, dan M. Nasiir. 2021. "Pelacakan Kesejahteraan Pasca Krisis: Tanggap Darurat Bencana Sulawesi Tengah (*Welfare Tracking in the Aftermath of Crisis: The Central Sulawesi Disaster Response*)."
- REACH Initiative. 2021. "Alat Penilaian Darurat Rumah Tangga (HEAT) Afghanistan ERM 11 Agustus 2021 (*Household Emergency Assessment Tool (HEAT) Afghanistan ERM 11, August 2021*)."
- SIAP SIAGA. 2022. "Tinjauan Partisipatif terhadap Tanggap Darurat Letusan Semeru: Laporan Pembelajaran dan Rekomendasi (*Participatory Review of Semeru Eruption Response: Lessons Learned and Recommendation Report*)."
- Statista. 2022. "Bencana Alam di Indonesia - Statistik dan Fakta (*Natural Disasters in Indonesia - Statistics and Facts*)."
- Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB. 2016. "Alat Penilaian Darurat Rumah Tangga Afghanistan (*Afghanistan Household Emergency Assessment Tool*) (HEAT)."
- V. Barca dan R. Beazley. 2019. "Membangun Sistem Pemerintah untuk Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Guncangan: Peran Data dan Informasi Bantuan Sosial (*Building on Government Systems for Shock Preparedness and Response: The Role of Social Assistance Data and Information*)."
- Williams, A. 2020. "Pengkajian Rumah Tangga Pasca Bencana dan Penetapan Syarat Calon Penerima Manfaat Perlindungan Sosial Pasca Bencana (*Post-Disaster Household Assessments and Eligibility Determination for Post-Disaster Social Protection Benefits*). Bank Dunia."
- Bank Dunia. 2019. "Memperkuat Ketahanan Bencana Kota-kota di Indonesia: Catatan Kebijakan (*Strengthening the Disaster Resilience of Indonesian Cities: A Policy Note*)."
- Bank Dunia. 2019b. "Perlindungan Sosial Adaptif dan Manajemen Risiko Bencana: Studi Kasus di Jepang (*Adaptive Social Protection and Disaster Risk Management: A Case Study of Japan*)."
- Bank Dunia. 2022. "Memetakan Arah Menuju Perlindungan Sosial Universal: Ketahanan, Kesetaraan, dan Kesempatan untuk Semua (*Charting a Course Towards Universal Social Protection: Resilience, Equity, and Opportunity for All*)."
- Bank Dunia. 2023. "Bank Dunia dalam Perlindungan Sosial (*The World Bank in Social Protection*)."
- Williams, Asha, Gracia Hadiwidjaja, Rabia Ali, dan Imam Setiawan. 2023. "Perlindungan Sosial Adaptif, Sumber Daya Manusia, dan Perubahan Iklim: Mengidentifikasi prioritas kebijakan untuk Indonesia (*Adaptive Social Protection, Human Capital, and Climate Change: Identifying policy priorities for Indonesia*)."
- Y. Jibiki, dkk. 2020. Implementasi Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana di Indonesia: Tinjauan Pustaka (*Implementation of Post Disaster Needs Assessment in Indonesia: Literature Review*).

# Endnotes

- <sup>1</sup>Government of Chile. 2023. [Basic Emergency File - FIBE \(Ficha Básica de Emergencia\)](#).
- <sup>2</sup>Government of Chile. 2017. "Optimizing the Emergency Response: Social Diagnosis in Emergency (Optimizando la respuesta frente a la emergencia: Diagnóstico Social en Emergencia)." PowerPoint presentation.
- <sup>3</sup>Government of Chile. 2019. Social Diagnosis in Emergency: The Experience of Chile. (*Diagnóstico Social en Emergencia: Experiencia de Chile*). PowerPoint presentation at the Latin America and Caribbean Forum on Strengthening Social Protection for Disaster Resilience, Lima Peru.
- <sup>4</sup>Ministry of Social Development, Government of Chile. 2016. Manual of Procedures of the Basic Emergency File: Social Diagnosis in Emergency (*Manual de Procedimientos de la Ficha Básica de Emergencia: Diagnostico Social en Emergencia*).
- <sup>5</sup>Government of Chile. 2019. Social Diagnosis in Emergency: The Experience of Chile (*Diagnóstico Social en Emergencia: Experiencia de Chile*). PowerPoint presentation at the Latin America and Caribbean Forum on Strengthening Social Protection for Disaster Resilience, Lima Peru.
- <sup>6</sup>Government of Chile. Decree No. 156/2002; Decree No. 697/2015; National Emergency Plan, 2017.
- <sup>7</sup>*Ibid.*
- <sup>8</sup>Williams, A. 2020. "Post-Disaster Household Assessments and Eligibility Determination for Post-Disaster Social Protection Benefits." The World Bank.
- <sup>9</sup>Government of Chile. 2017. Optimizing the Emergency Response: Social Diagnosis in Emergency (*Optimizando la respuesta frente a la emergencia: Diagnóstico Social en Emergencia*). PowerPoint presentation.
- <sup>10</sup>*Ibid.*
- <sup>11</sup>Leite, P. *et al.* 2017. Social Registries for Social Assistance and Beyond: A Guidance Note & Assessment Tool (World Bank).
- <sup>12</sup>Barca, P., and R. Beazley. 2019. "Building on Government Systems for Shock Preparedness and Response: The Role of Social Assistance Data and Information."
- <sup>13</sup>Faundez. 2019. "Nuts and Bolts: Post-Emergency Social Diagnosis in Chile" in V. Barca and R. Beazley. 2019. "Building on Government Systems for Shock Preparedness and Response: The Role of Social Assistance Data and Information."
- <sup>14</sup>Government of Jamaica. 2021. "National Emergency Relief Clearance Plan - Pocket Version: For the Facilitation of International Disaster Relief and Assistance"
- <sup>15</sup>Ministry of Labor and Social Security, Government of Jamaica. 2019. "Adaptive Social Protection Building Resilience: The Role of Social Workers." PowerPoint presentation at the Latin America and Caribbean Forum on Strengthening Social Protection for Disaster Resilience, Lima Peru.
- <sup>16</sup>Facilitated via World Bank Technical Assistance: Strengthening Jamaica's Social Protection System for Disaster Preparedness and Response (P159232).
- <sup>17</sup>Technical working group discussions: World Bank Technical Assistance: Strengthening Jamaica's Social Protection System for Disaster Preparedness and Response (P159232)
- <sup>18</sup>The consultations were carried out through a technical working group under the World Bank's Technical Assistance: Strengthening Jamaica's Social Protection System for Disaster Preparedness and Response (P159232), which included the Office for Disaster Preparedness and Emergency Management, the Ministry of Labour and Social Security, the Planning Institute of Jamaica; Municipal Corporations; and NGOs including the Red Cross and Food for the Poor.





